



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2020**



**SEMARAPURA  
2020**



## BUPATI KLUNGKUNG

### **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Semarapura, 2 Januari 2020  
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

## DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja _____	ii
Daftar Isi _____	iii
<b>PENDAHULUAN</b> _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah _____	1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja _____	2
<b>PERJANJIAN KINERJA</b> _____	3
2.1. Perencanaan Kinerja _____	3
2.2. Perjanjian Kinerja _____	7
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja _____	7
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran _____	7
<b>PENUTUP</b> _____	22

# **PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

## **1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

- d. Dinas Pendidikan
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
  - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
  - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - n. Dinas Perhubungan
  - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - p. Dinas Pariwisata
  - q. Dinas Pertanian
  - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Banjarnegaran
  - b. Kecamatan Klungkung
  - c. Kecamatan Nusa Penida
  - d. Kecamatan Dawan

### **1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung.

# PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Perencanaan Kinerja

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka. Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan

pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali. Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai “PANCA SANTI” yang pelaksanaannya dilandasi semangat GEMA SANTI (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukannya kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran
<i>Misi 1 : Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.</i>	
1. Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)
<i>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.</i>	
1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
	1.3 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
<i>Misi 3: Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.</i>	
1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS
	1.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender
	1.3 Terpenuhinya Hak Anak
	1.4 Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri
	1.5 Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Berkualitas dan Seimbang
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	2.1. Meningkatnya investasi daerah
	2.2. Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat
	2.3. Meningkatnya keragaman pola pangan harapan



Tujuan	Sasaran
<i>Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik</i>	
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	1.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	2.1 Meningkatnya kesadaran berdemokrasi
	2.2 Menurunkan potensi konflik
	2.3 Menurunnya tingkat risiko bencana
	2.4 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
<i>Misi 5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	
1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1 Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2020 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

### 2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2020, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung  
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24,00
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34
4	Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	56
6	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik Yang Mantap	Indeks Demokrasi Daerah	77,1
7	Berkurangnya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	86

### 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan 145 program. Adapun program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4  
Program dan Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja  
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Program Yang Mendukung	Anggaran Induk 2020	Keterangan
1	Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah	Cakupan budaya daerah yang dilestarikan (%)	24	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.099.799.608,00	Disbudpora
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.579.525.533,00	Disbudpora
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.032.842.803,00	Disbudpora
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.316.022.408,00	Dinkes
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.208.722.475,00	Dinkes
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	992.537.700,00	Dinkes
				Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	1.491.694.750,00	Dinkes
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	990.449.350,00	Dinkes
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	33.929.724.220,00	Dinkes
				Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.648.805.743,00	Dinkes
				Program Penanggulangan Penyakit Menular	1.954.483.550,00	Dinkes
				Program Pencegahan Penyakit Menular	187.025.000,00	Dinkes
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	280.000.000,00	RSUD
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	385.100.000,00	RSUD
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	39.386.540.047,95	RSUD
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	135.560.377,00	RSUD

				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	78.000.000.000,00	RSUD
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	13.491.061.484,00	Disdik
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13.006.014.782,00	Disdik
				Program Pendidikan Non Formal	1.210.673.500,00	Disdik
				Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.880.000.000,00	Disdik
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	1.526.464.686,00	Disdik
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	13.623.505.368,00	Disdik
				Program Penyelenggaraan Perpustakaan	269.265.556,00	Disarpus
				Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	4.116.801.784,00	Disbudpora
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.483.744.500,00	DPTK
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	146.865.000,00	DPTK
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	957.298.607,00	DPTK
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.123.614.780,00	DSPPPA
				Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	7.123.787.000,00	DSPPPA
				Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	3.271.804.722,12	DSPPPA
				Program Penguatan Kelembagaan	421.621.500,00	DSPPPA

				Pengarusutamaan Gender dan Anak		
				Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	254.648.500,00	DSPPPA
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	2.834.254.454,00	DPMDPPKB
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.633.638.898,34	DPMDPPKB
				Program Keluarga Berencana	2.075.007.004,00	DPMDPPKB
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	658.413.824,85	DPMDPPKB
				Program Transmigrasi Regional	89.083.000,00	DPMDPPKB
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB	6	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	124.267.152,00	DPMPTSP
				Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	194.728.402,00	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	373.116.500,00	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	135.033.500,00	DPMPTSP
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	245.095.641,25	DPMPTSP
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	170.958.900,00	DPMPTSP
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	496.733.950,00	DKUKM
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	774.836.500,00	DKUKM
				Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	803.468.500,00	DKUKM
				Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	11.766.493.472,00	DKUKM

				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	143.632.552,00	DKUKM
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.927.604.354,50	DISPAR
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7.820.541.429,00	DISPAR
				Program Industri Pariwisata	1.493.349.684,00	DISPAR
				Program Sumber Daya Pariwisata	1.717.191.475,00	DISPAR
				Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	978.981.152,00	DISTAN
				Program Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman	468.367.185,00	DISTAN
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	546.385.152,00	DISTAN
				Program Peningkatan Produksi Peternakan	887.683.256,00	DISTAN
				Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	60.641.500,00	DISTAN
				Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Pertanian	743.720.836,00	DISTAN
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	576.974.200,00	DKPP
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	666.087.080,00	DKPP
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	1.978.085.601,00	DKPP
5	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	56	Program Pengembangan Otonomi Daerah	789.163.854,72	SETDA
				Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.531.147.588,76	SETDA
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	10.340.881.587,00	SETDA

			Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	569.128.464,00	SETDA
			Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	629.020.396,00	SETDA
			Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	608.127.724,00	SETDA
			Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	926.197.564,00	SETDA
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.411.639.645,00	SETDA
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	890.562.608,00	SETWAN
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	29.578.045.999,00	SETWAN
			Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	646.461.672,00	SETWAN
			Program Peningkatan Kinerja DPRD	2.430.169.864,00	SETWAN
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	275.966.000,00	KEC. KLUNGKUNG
			Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	50.820.000,00	KEC. KLUNGKUNG
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	214.742.000,00	KEC. KLUNGKUNG
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja	682.340.114,87	KEC. KLUNGKUNG
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kangin	772.670.069,53	KEC. KLUNGKUNG
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh	724.964.327,71	KEC. KLUNGKUNG

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Tengah	736.782.132,69	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod	745.943.480,88	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod Kangin	742.384.898,30	KEC. KLUNGKUNG
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	2.141.129.000,00	KEC. BANJARANGKAN
				Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	17.404.000,00	KEC. BANJARANGKAN
				Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	166.079.500,00	KEC. BANJARANGKAN
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	636.772.454,00	KEC. NUSA PENIDA
				Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	12.249.700,00	KEC. NUSA PENIDA
				Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	122.632.600,00	KEC. NUSA PENIDA
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	366.093.000,00	KEC. DAWAN
				Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	31.161.000,00	KEC. DAWAN
				Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	188.144.000,00	KEC. DAWAN
				Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	1.954.592.452,00	INSPEKTORAT



				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	207.959.152,00	INSPEKTORAT
				Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih	580.796.252,00	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	218.474.250,00	BAPERLITBANG
				Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	444.702.152,00	BAPERLITBANG
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	954.084.500,00	BAPERLITBANG
				Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	712.849.000,00	BPKPD
				Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	395.238.500,00	BPKPD
				Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	789.665.776,00	BPKPD
				Program Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	904.792.704,00	BPKPD
				Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	569.823.088,00	BPKPD
				Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	577.925.000,00	BPKPD
				Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara	181.172.300,00	BKPSDM
				Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	477.473.616,00	BKPSDM
				Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	1.465.041.494,00	BKPSDM
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3.672.551.469,00	BKPSDM
				Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.167.434.500,00	BAPERLITBANG
				Program Penyelenggaraan Kearsipan	97.380.200,00	DISARPUS

				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	128.925.304,00	DLHP
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.519.476.146,00	DISKOMINFO
				Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	596.978.250,00	DISKOMINFO
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	169.813.500,00	DISKOMINFO
				Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah	199.916.000,00	DISKOMINFO
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	408.248.000,00	DISDUKCAPIL
				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	739.315.000,00	DISDUKCAPIL
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil	691.385.000,00	DISDUKCAPIL
6	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	77,1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	141.037.600,00	KESBANG
				Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	103.751.000,00	KESBANG
				Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	169.624.300,00	KESBANG
				Program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	682.420.400,00	KESBANG
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	274.505.000,00	BPBD
				Program Pengurangan Resiko Bencana		BPBD
				Program Penanganan Darurat Bencana	906.056.280,00	BPBD
				Program Penanggulangan Bencana	1.492.193.000,00	BPBD
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.902.145.940,00	SATPOLPP DAMKAR

				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	244.536.896,00	SATPOLPP DAMKAR
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.322.471.568,00	SATPOLPP DAMKAR
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	231.993.764,00	SATPOLPP DAMKAR
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2.551.000,00	DPMPTSP
				Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	46.159.190.488,00	PUPRKP
				Program Pengembangan Keciptakarya	50.428.121.456,00	PUPRKP
				Program Penataan Ruang	867.404.000,00	PUPRKP
				Program Pengembangan Bina Konstruksi	1.254.455.000,00	PUPRKP
				Program Pengembangan Sumber Daya Air	8.688.004.488,00	PUPRKP
				Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.956.625.250,00	PUPRKP
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7.826.323.979,00	DISHUB
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	11.820.672.846,00	DISHUB
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6.846.838.076,87	DISHUB
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	264.934.252,00	DISHUB
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.132.468.190,00	DLHP
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	339.976.608,00	DLHP

				Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH	6.984.596.604,00	DLHP
				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	55.348.652,00	DLHP

## **PENUTUP**

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2020. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* dan *clean government*, khususnya melalui peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

